

KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA-PERANCIS DALAM MEMENUHI *MINIMUM ESSENTIAL FORCE TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015 - 2019*

Utaryo Santikoⁱ, Maria Davina Agustienⁱⁱ

utaryo@binus.ac.id

Abstract

This research aims to observe the effectiveness of defence industry cooperation Between Indonesia and France in meeting the Minimum Essential Force Indonesia for the 2015-2019 periods. The research method used is a qualitative method with a type of descriptive research and data search techniques through interviews and literature studies. Measurement method in describing and analyzing the effectiveness of the Indonesian-French defence industry cooperation in meeting the MEF is quantitative. The theory that used in this research is military transformation theory according to Andrew Krepinevich. The results of this research found that the defence industry cooperation between Indonesia and French was quite significant and effective in supporting Indonesia to achieve the military transformation through Minimum Essential Force (MEF), but there are still needs to be increased in certain sectors.

Key Words: Defence Industry Cooperation, MEF, Military Transformation, Defence Industry

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dalam memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Periode 2015 - 2019. Upaya Indonesia dalam membangun kekuatan pokok minimum pertahanan nasional tentunya tidak terlepas dari kerja sama dengan negara yang memiliki kapabilitas industri pertahanan yang maju, salah satunya adalah Perancis. Perancis menyatakan dukungannya kepada pembangunan kekuatan pokok minimum pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan serangkaian kegiatan kerja sama antar industri pertahanan untuk membangun kekuatan pokok minimum pertahanan Indonesia guna memajukan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pencarian data melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian metode dalam pengukuran yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam memenuhi MEF adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teori transformasi militer menurut Andrew Krepinevich. Hasil Penelitian menemukan bahwa kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis cukup signifikan dan efektif dalam membantu Indonesia mencapai transformasi militer melalui *Minimum Essential Force* (MEF), namun masih perlu ditingkatkan kembali pada sektor – sektor tertentu.

Kata Kunci: Kerja sama Industri Pertahanan, MEF, Transformasi Militer, Industri Pertahanan.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, dinamika keamanan dalam hubungan internasional terus mengalami perkembangan. Kemampuan militer negara-negara tetangga menguat secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia, hal ini semakin membawa posisi Indonesia terancam dalam Hubungan Internasional. Oleh karena itu kebutuhan akan modernisasi dan transformasi

dalam rangka pembangunan nasional untuk menciptakan bangsa yang kuat dan berdaya saing, semakin layak untuk diprioritaskan. Tidak hanya pada sektor ekonomi dan infrastruktur, melainkan pada sektor pertahanan nasional yang menjadi ujung tombak bagi Indonesia untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal ancaman baik pada lingkup regional maupun internasional. Selain dari pada itu, kebutuhan akan transformasi dan

moderenisasi juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan untuk membangun militer Indonesia yang professional dan menjadi kekuatan nasional yang mampu menjalankan fungsinya dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks (Kementerian Pertahanan RI, 2008).

Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan pembangunan postur pertahanan Indonesia dirumuskan dalam sebuah rencana strategis guna memenuhi Kekuatan Pokok Minimum/*Minimum Essential Force* (MEF). Pokok pikiran dan langkah-langkah mengenai rencana strategis ini dijabarkan pada *Strategic Defence Review* (SDR) Tahun 2009 yang telah tercatat pada Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 2 Tahun 2010. MEF kemudian ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014 sesuai dengan Peraturan Persiden No. 5 tahun 2010 dengan dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama adalah 2010-2014, tahap kedua 2015-2019 dan tahap ketiga 2020-2024. Dirumuskannya MEF tidak mengarah pada perlombaan senjata (*arm race*) maupun diarahkan untuk memicu konflik atau peperangan, melainkan dimaksudkan sebagai postrur ideal negara dimana tujuannya adalah sebagai respon ancaman baik ancaman aktual maupun ancaman mendatang, membangun *Confident Building Measures* (CBM), sebagai bentuk penangkalan terhadap ancaman dan menjadi manajemen pertahanan sebagai pedoman bagi kebijakan postur pertahanan. MEF memiliki 4 (empat) strategi yakni dengan melakukan rematerialisasi, revitalisasi, relokasi dan pengadaan. Dalam hal pengadaan, diharapkan semua produk berasal dari industri dalam negeri, apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi, pengadaan Alutsista dari luar negeri harus disertai dengan *Transfer of Knowledge* (ToK) dan *Transfer of*

Technology (ToT) yang sesuai dengan rencana kerja dan kesepakatan kerja sama (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Dalam upaya melakukan pembaharuan dalam sistem pertahanan khususnya pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pembangunan postur pertahanan, Indonesia melakukan kerja sama pertahanan dengan banyak negara salah satunya adalah Perancis. Indonesia dan Perancis pada dasarnya telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai kerja sama peralatan, logistik dan industri pertahanan antar kedua negara telah ditandatangani sejak 1996. Hubungan antar kedua negara terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan hubungan bilateral antara Perancis dengan Indonesia tidak luput dari kepentingan masing-masing negara. Bagi Perancis, Indonesia merupakan mitra strategis dalam upaya menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik sebagai Zona lalu lintas perekonomian dunia. Perancis melihat Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN, memiliki peran yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, peningkatan kerja sama khususnya dalam bidang pertahanan dengan Perancis dapat menjadi peluang bagi Indonesia menggali setiap potensi dalam mengembangkan kekuatan pertahanan negara dalam berbagai sektor, mengingat industri pertahanan Perancis juga terus mengalami perkembangan yang signifikan. Selain itu, kesamaan prinsip dalam menjalankan politik luar negeri antara politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan *Politique Independence France*, menciptakan kenyamanan bagi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama. Hubungan bilateral antar kedua negara yang telah terjalin cukup lama ini membawa kedua negara kepada fase kerja sama yang lebih erat termasuk

dalam sektor pertahanan terutama setelah Perancis menyatakan dukungannya bagi Indonesia dalam memenuhi MEF. Komitmen Perancis ditunjukkan dengan ditandatanganinya kesepakatan mengenai kemitraan strategis pada 2011 dan dibentuknya *Indonesia-France Defence Dialogue* (IFDD) sebagai forum dialog yang mengkaji setiap penyelenggaraan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Perancis.

KERANGKA ANALISIS

Untuk menganalisa penelitian ini, konsep pertama yang digunakan adalah konsep *Revolution in Military Affairs* (RMA). US Department of Defence's Office of Force Transformation mendefinisikan RMA sebagai sebuah proses dalam membentuk perubahan sifat perang dan kerja sama melalui serangkaian kombinasi dari konsep, kapabilitas, sumber daya manusia, dan organisasi yang mengeksplorasi keunggulan bangsa dan melindungi bangsa dari kerentanan asimetris untuk mempertahankan posisi strategis bangsa dan membantu perdamaian dunia (US Department of Defence, 2004).

Indonesia pada dasarnya telah menginisiasi reformasi militer sejak 1998, namun belum mengarah pada revolusi teknologi militer (Widjajanto, 2012). Kemudian pada 2009 mulai dirancang MEF yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi misi nawacita pemerintah yakni menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang aman dan damai serta berkontribusi dalam perdamaian dunia. MEF diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan menangkal ancaman baik ancaman internal maupun eksternal serta ancaman tradisional maupun non-tradisional (non-militer) melalui revolusi teknologi

militer (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Teknologi militer merupakan variabel utama dari terlaksananya transformasi militer sebagai perwujudan dari reformasi militer. Dalam melakukan revolusi teknologi militer, Indonesia harus mampu mengembangkan kapasitas teknologi militer yang kemudian mampu meningkatkan komponen militer secara signifikan (Widjajanto, 2012). Konsep mengenai transformasi militer sendiri menurut Andrew Krepinevich adalah sebagai suatu proses sistematik untuk mengaplikasikan teknologi baru ke dalam sistem militer yang dikombinasikan dengan suatu konsep operasional dan adaptasi organisasi yang inovatif sehingga merubah secara fundamental karakter dan metode konflik (Widjajanto, 2012). Menurut Eliot Cohen, instrumen perang merupakan kombinasi dari teknologi militer, organisasi militer dan strategi operasional militer (Cohen, 2009). Sehingga dalam suatu proses transformasi pertahanan, segitiga instrumen perang ini akan berubah (Widjajanto, 2012). *Minimum Essential Force* kemudian dapat dikategorikan sebagai langkah dalam melakukan transformasi militer dengan melakukan pendekatan inovatif melalui kerja sama dengan Perancis dalam mengembangkan kapasitas teknologi militer salah satunya dengan membangun industri pertahanan.

Andi Widjajanto menjelaskan tiga model dalam membangun industri pertahanan. Model pertama adalah *Autarky Model* yang biasanya diterapkan oleh negara-negara yang memiliki ambisi untuk mendapatkan kemandirian pertahanan. Namun, model ini hanya bisa dicapai oleh negara-negara dengan postur militer yang kuat, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Model kedua adalah *Global Supply Chain Model* yang diterapkan negara-negara yang telah memiliki basis teknologi militer yang besar, namun tidak memiliki akses

terhadap pasar senjata internasional sehingga kemudian negara tersebut melakukan integrasi produksi senjatanya dengan konsorsium industri pertahanan global. Model terakhir adalah *Niche-Production Model*, dimana model ini dilakukan oleh negara yang berupaya mengurangi ketergantungan senjata terhadap produsen luar negeri dengan mengembangkan kapasitas nasional. Dalam penerapannya, suatu negara harus memiliki komitmen untuk melakukan investasi ke sektor industri pertahanan terutama dengan berupaya mendapatkan *Offset* dari produsen senjata yang mapan (Widjajanto, 2012).

Offset sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati oleh produsen persenjataan sebagai imbalan dari kesepakatan pembelian jasa dan barang-barang militer (Muradi, 2008). Terdapat dua jenis *offset*, yang pertama adalah *offset langsung* atau *direct offset* dan *indirect offset* atau *offset tidak langsung*. *Offset langsung* diartikan sebagai barang-barang atau jasa yang langsung terkait dengan peralatan militer yang dijual. Terdapat tiga jenis *offset* langsung, yang pertama pembelian lisensi produksi, yakni penjual persenjataan setuju untuk mentransfer teknologinya kepada negara pembeli, sehingga keseluruhan atau sebagian barang yang dipesannya dapat diproduksi di negara pembeli. Kedua adalah produksi bersama (*co-production*), dimana pembeli dan penjual tidak hanya mengupayakan pengadaan barang-barang militer saja, melainkan membuat barang dan jasa peralatan militer. Ketiga adalah pengembangan bersama (*co-development*), yakni pengembangan bersama negara produsen peralatan persenjataan dengan negara pembeli berupaya mengembangkan berbagai peralatan pertahanan yang telah diproduksi oleh negara penjual, dengan harapan didapat produk yang lebih baik

dari yang terdahulu, hal ini memberikan keuntungan bagi negara pembeli untuk secara aktif mengadopsi serta mentrasfer berbagai teknologi persenjataan secara langsung maupun tidak langsung sehingga secara bertahap meningkatkan kemampuan SDM di negara pembeli dapat terukur dengan baik (Muradi, 2008).

Sedangkan *indirect offset* memiliki empat jenis, yang pertama adalah barter, dimana antara negara produsen dan konsumen diiringi perjanjian bahwa penjual peralatan pertahanan tersebut bersedia dibayar dengan produk non-militer negara pembeli dengan nominal setara. Yang kedua imbal beli, yakni pemasok persenjataan setuju membeli atau menemukan pembeli produk non-militer dari negara konsumen dengan nominal yang telah ditentukan. Yang ketiga imbal investasi dimana pemasok persenjataan setuju untuk terlibat atau menemukan pihak ketiga yang mau menanamkan modal langsung di negara pembeli dengan nilai tertentu dari proses jual-beli tersebut. Yang terakhir adalah *Buy Back*, yakni pemasok persenjataan setuju membeli kembali atau menemukan pihak ketiga untuk membeli produk militer negara konsumen yang jualnya dengan jangka waktu tertentu (Muradi, 2008). *Niche-Production Model* ini kemudian dapat dikatakan sebagai model yang diterapkan Indonesia dalam membangun industri pertahanan melalui MEF, dimana dalam pemenuhannya ditetapkan kebijakan bahwa Alutsista harus merupakan produksi dalam negeri dan jika berasal dari luar negeri maka harus disertai transfer teknologi. *Niche-Production Model* ini diharapkan bisa menjadi awal bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian pertahanan.

Untuk menganalisis kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Perancis, konsep yang digunakan adalah konsep Diplomasi Pertahanan. Kementerian Pertahanan Inggris dalam

buku berjudul “*Joint Doctrine Publication 0-01 British Defence Doctrine*” mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai hubungan yang bertujuan untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu dalam pengembangan kekuatan yang bertanggung jawab, kompeten dan demokratis (UK Ministry of Defence, 2014). Pada dasarnya, dalam diplomasi pertahanan terdapat tiga varian utama, yang meliputi *Defense Diplomacy for Confident Building Measures*, *Defense Diplomacy for Defense Capabilities* dan *Defense Diplomacy for Defense Industry*. Varian yang digunakan dalam kerja sama Indonesia dan Perancis adalah *Defense Diplomacy for Defense Industry*, dimana diplomasi dilaksanakan dengan tujuan membangun dan memperkuat industri pertahanan suatu negara. Hasil yang ditimbulkan dari diplomasi ini adalah independensi politik dan ekonomi sehingga menurunkan tingkat interdependensi atau ketergantungan suatu negara dalam pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista). Pola kerja sama yang dilakukan dalam kerja sama ini antara lain dengan melalui kerja sama strategis antar kedua negara dalam produksi senjata, pengembangan dan penelitian senjata, pemberian lisensi, investasi dalam industri pertahanan serta transfer teknologi.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis dalam MEF Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2015-2019” penulis melakukan pengukuran data menggunakan pendekatan dengan melakukan pengukuran kuantitatif dari setiap data yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode *field research* (penelitian

lapangan) dengan melakukan *interview*, studi literatur, dan *survey*.

PEMBAHASAN

Indonesia melakukan kerja sama dalam pengadaan Alutsista dan kerja sama industri pertahanan dengan mitra luar negeri berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri pertahanan yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri dan Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 30 tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan *Offset* dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri. Undang-Undang No. 16 tahun 2012 mengatur bahwa setiap pengadaan Alutsista dari mitra luar negeri wajib memiliki kontribusi dari industri pertahanan dalam negeri baik yang berbentuk kandungan lokal dimana beberapa produk dalam negeri digunakan dalam produk tersebut atau terdapat *Offset* yakni mengenai transfer teknologi yang nilainya minimal 85% dari nilai pengadaan. Perhitungannya dilihat berdasarkan *Value* bukan *Cost*, jadi jika Alutsista yang dibeli seharga 1 miliar rupiah, maka *value* yang harus didapatkan oleh industri pertahanan Indonesia adalah 85% nilai tersebut yang dapat dipenuhi melalui imbal dagang (Laksmono, 2019).

Pelaksanaan kerja sama industri pertahanan tersebut kemudian digunakan Indonesia untuk memenuhi kekuatan pokok minimum pertahanan/ *MEF* TNI. Pemenuhan *MEF* dibagi dalam 3 (tiga) tahap; tahap pertama adalah tahun 2010-2014 yang berfokus pada pemenuhan alutsista; kemudian tahap kedua tahun 2015-2019 yang memiliki fokus pada pemenuhan alutsista, pengembangan organisasi, serta pemeliharaan dan perawatan; dan tahap terakhir tahun 2020-2024 dimana aspek pendukung

pemenuhannya adalah pada kemajuan dan kemandirian industri pertahanan, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI. (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Pelaksanaan Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia – Perancis

Hubungan bilateral Indonesia dengan Perancis yang telah berjalan selama 70 tahun, membawa kedua negara memasuki babak baru. Hubungan yang semakin kuat ditunjukkan melalui kemitraan strategis yang disepakati tahun 2011. Kemitraan strategis tersebut menciptakan hubungan yang komprehensif antar kedua negara. Berlandaskan kesamaan prinsip dan kepercayaan yang telah terbangun sejak lama, Indonesia dengan Perancis tidak ragu untuk menjalin kerja sama dalam mendukung kemampuan pertahanan terutama bagi Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan diperkuatnya kerja sama antar industri pertahanan Indonesia dengan Perancis. Bagi Indonesia, sebagai negara yang sedang merintis menjadi negara dengan kekuatan pertahanan yang mandiri, Perancis merupakan mitra yang potensial dalam mewujudkan hal tersebut. Berikut beberapa kerja sama yang dilakukan antar industri pertahanan Indonesia dengan Perancis;

- Kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan Airbus Helicopters dalam pemberian lisensi atas produk **AS550 “Fennec” (Airbus H125M) Light Utility Military Helicopter**. Pengadaan AS550 Fennec *Light Military Helicopter* untuk dimodifikasi PT DI dilaksanakan sejak 2012 hingga 2017 sebanyak 12 unit (SIPRI, 2020).
- Kerja sama *Co-Production and Co-Development* produk **H225/H225M Tactical Transport Helicopter** antara PT DI dengan Airbus Helicopters. Kontrak pembelian helikopter ini disepakati pada 2012 untuk

memenuhi kebutuhan helikopter *Combat Search and Rescue* TNI Angkatan Udara (AU). Pengadaan dilakukan selama 2016 sampai 2017 sebanyak 6 unit (SIPRI, 2020).

- Kerja sama transfer teknologi antara PT DI dengan Airbus Helicopters dalam pemberian lisensi produk **AS565 MBe “Panther” Maritime Helicopter**. Kontrak ditandatangani pada 2014 dan pengadaan 11-unit helikopter dilakukan pada 2016 - 2019 (SIPRI, 2020).
- Kerja sama transfer teknologi antara PT DI dengan Airbus Helicopters dalam pemberian lisensi produk **AS332C1e “Super Puma” (Airbus H125M) Medium Military Helicopter** yang dipesan pada 2014 sebanyak 5-unit untuk PT DI yang akan dimodifikasi untuk kebutuhan TNI AU (SIPRI, 2020).
- Kerja sama pemberian *Offset* produk **Nexter CAESAR 155mm Self-Propelled Howitzer** berupa *Co-Production* dengan memasukan kandungan lokal dan *Co-Development* antara PT Pindad (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero) dengan Nexter (Laksmono, 2019).
- Kerja sama *Co-Production* dan *Co-Development* **Pindad “Komodo” 4x4 Light Armored Vehicle** varian *Mobile Anti-Aircraft Surface-to-Air Missile (SAM) Launcher* antara PT Pindad (Persero) dengan MBDA
- Kerja sama *Co-Production* dan *Co-Development* **Pindad “Komodo” 4x4 Light Armored Vehicle** varian *Reconnaissance Mobile Command* antara PT Pindad (Persero) dengan Nexter.
- Kerja sama *Co-Production* dan *Co-Development* **Pindad “Anoa” 6x6 Armoured Personnel Carrier (APC)** antara PT Pindad (Persero) dengan Renault Trucks Defense melalui pengadaan mesin MIDR.

- Kerja sama *Co-Development Exocet Anti-Ship Missile* dan *Mistral Surface-to-Air Missile (SAM)* antara PT Pindad (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero) dengan MBDA.
- Kerja sama pemberian *Offset* produk *Renault Sherpa Armored Vehicle* antara Renault Trucks Defense dengan PT Pindad (Persero) yang kemudian dikembangkan menjadi *Pindad "Elang" 4x4 Light Armored Vehicle*.
- Kerja sama *Co-Development* antara Thales Group dengan PT LEN Industri (Persero) dalam pemeliharaan dan perawatan Radar **Ground Master-200** dan **Master-T**.

Efektivitas Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis

Industri pertahanan merupakan elemen pendukung utama dalam memenuhi MEF Indonesia, yang merupakan bentuk pelaksanaan RMA. Untuk itu melalui MEF industri pertahanan Indonesia didorong untuk lebih berkembang, maju, berdaya saing dan mandiri. Melalui MEF, pemerintah mengharapkan terjadinya Transformasi Pertahanan dimana terwujudnya Negara *Autarky* atau negara dengan kemandirian pertahanan. Pembangunan MEF tidak semata-mata diarahkan pada pengadaan Alutsista hingga mencapai postur ideal pertahanan, melainkan untuk memenuhi tujuan lain yang meliputi peningkatan kemampuan industri pertahanan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Pengukuran efektivitas kerja sama industri pertahanan Indonesia

dengan Perancis dalam memenuhi MEF dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama dilakukan pengukuran berdasarkan kebutuhan TNI Angkatan Darat (AD), bagian kedua berdasarkan kebutuhan TNI Angkatan Laut (AL) dan yang ketiga berdasarkan kebutuhan TNI AU.

TNI AD

Total keseluruhan kebutuhan logistik, peralatan dan alutsista yang dibutuhkan TNI AD untuk dipenuhi pada pembangunan MEF Tahap II adalah sejumlah 629 *Unit* yang terdiri dari 393 *Unit* Kendaraan Darat, 18 *Unit* Helikopter, 202 *Unit* Rudal dan 16 Paket Peralatan lainnya. Kolaborasi industri pertahanan Perancis dan Indonesia berhasil memenuhi 272 *Unit* yang diantaranya adalah 114 *Unit* Rantis Komodo dengan 4 varian, dimana 2 varian diantaranya merupakan hasil kolaborasi dengan MBDA dan Nexter Perancis, kemudian 158 Panser Anoa sebagai Panser andalan TNI yang menggunakan mesin dari Renault Perancis. Selain itu, kebutuhan 18 *Unit* Helikopter yang terdiri dari helikopter angkut sedang, angkut berat dan helikopter serbu, kolaborasi Industri Pertahanan Perancis Airbus Helicopters dan PT DI berhasil memproduksi 12-unit helikopter *Fennec* yang merupakan halikopter serbu ringan (Kementerian Pertahanan RI, 2017). Yang Terakhir, Kebutuhan Rudal Mistral sebanyak 50 *Unit* dari MBDA Perancis berhasil dipenuhi (SIPRI, 2020).

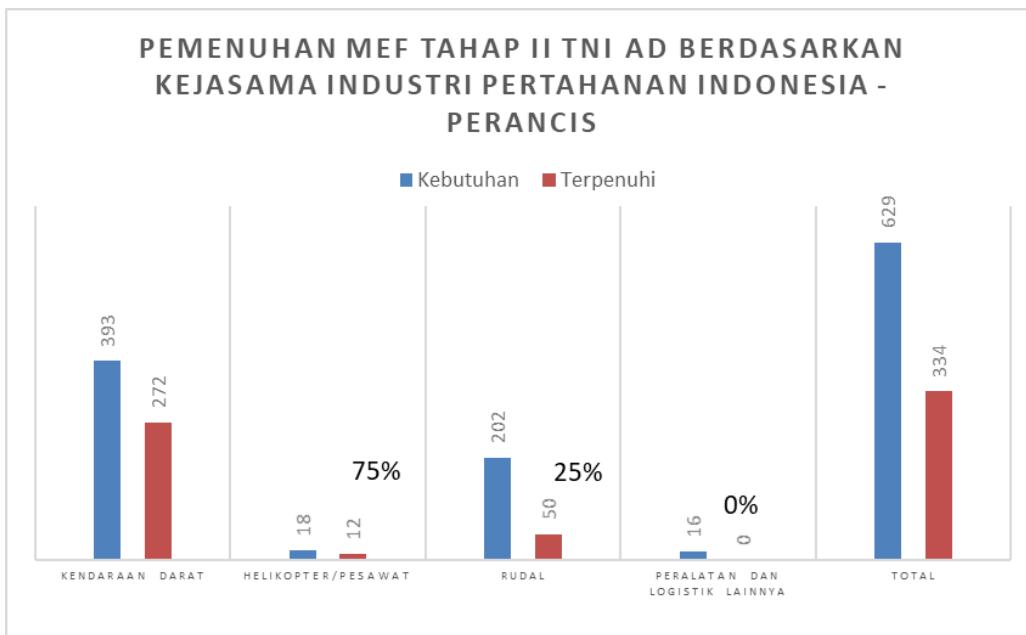
Tabel 1.
Kebutuhan Alutsista TNI AD Pada Pembangunan MEF Tahap II yang Berhasil Dipenuhi Melalui Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis

No.	Jenis Alutsista	Jumlah Unit Yang Dibutuhkan	Jumlah Unit Yang Terpenuhi	Keterangan
1.	Kendaraan Darat (Ranpur, Rantis, Panser)	393 Unit	272 Unit	Rantis Komodo produksi PT. Pindad dengan varian pelontar rudal Mistral MBDA Perancis dan varian <i>Mobile Command and Communication</i> Nexter Perancis. Kemudian Panser Anoa produksi PT. Pindad yang menggunakan mesin Renault
2.	Helikopter (Helikopter angkut sedang, Helikopter angkut berat, Helikopter Serbu)	18 Unit	12 Unit	Helikopter Serbu Ringan Fennec AC-550C3, AS-555AP, AS350B3 Produksi Airbus Perancis yang dimodifikasi oleh PT.DI
3.	Rudal	202 Unit	50 Unit	Rudal Mistral MBDA
4.	Peralatan dan Logistik Lainnya	16 Paket	-	-
5.	Total Kebutuhan Alutsista dan Peralatan Lainnya	629 Unit	334 Unit	-

Sumber: Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Melalui data tersebut, jika dilakukan perhitungan angka (Grafik 1.) maka terlihat seberapa besar kontribusi dari kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam memenuhi MEF Tahap II TNI AD. Dalam memenuhi pengadaan kendaraan darat, kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis berhasil memberi kontribusi sebesar 69%. Sedangkan untuk pengadaan helikopter dan pesawat, kerja sama kedua negara berhasil memenuhi 75% dari kebutuhan mengingat kolaborasi antara Airbus Helicopters dengan PT DI sudah terjalin cukup lama dengan produk yang dihasilkan juga sudah

teruji kualitasnya. Kemudian untuk pengadaan rudal, kolaborasi kedua negara setidaknya memenuhi 25% kebutuhan. Dalam rencana pengadaan peralatan dan logistik lainnya untuk TNI AD, belum ada yang dipenuhi melalui kerja sama indhan Indonesia-Perancis. Total dari keseluruhan pengadaan alutsista yang dibutuhkan TNI AD, 53% dapat terpenuhi melalui kerja sama antar indhan Indonesia-Perancis. Melihat angka tersebut, kolaborasi industri pertahanan Indonesia-Perancis dapat dikatakan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi TNI AD.

Grafik 1.**TNI**

Pembangunan MEF Tahap II TNI AL diantaranya meliputi pengadaan Kapal *Offshore Patrol Vessel* 4 Unit, Kapal Angkut *Tank* 6 Unit, KCR-60 3 Unit, Platform KCR-60 1 Unit, Platform KCR-60 1 Paket, Kapal *Fregate* 4 Unit, FFBNW Kapal PKR-10514 2 *Shipset*, FCS SAM Pengganti *Seawolf* MRLF 3 *Shipset*, Upgrade FCS SSM *Exocet* MM 40 *Block* 2 menjadi *Block* 3 30 Unit, FCS kapal MLRF 3 *Shipset*, Kapal Selam kelas Kilo 2 Unit, Kapal *Mine Counter Measure* 2 Unit, Meriam Kal 40 mm 4 Unit, Meriam Kal

30mm 8 Unit, Pesawat Patroli Meriam 1 Unit, Helikopter Angkut 1 Unit, *Full Combat Mission* Helikopter AKS AS565 MBe *Panther* 4 Paket, *Tank/Ranpur* Angkut Personel 12 Unit, *Tank Amfibi* BMP-3F 27 Unit, MKB (kal 76 mm Otomelara, kal 105 mm *Howitzer*, kal 40 mm L/70 dan L/60, kal 57 mm Bofors, serta kal 30 mm 7/30 dan 6/30) sebanyak 52.700 butir, Torpedo Kapal Selam 1 Paket, Rudal SAM Kapal MRLF 6 Unit, Rudal C-802 4 Unit, Rudal C-705 6 Unit, Rudal *Yakhont* 2 Unit dan Rudal MICA VLS 6 Unit (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Tabel 2.

Kebutuhan Alutsista TNI AL Pada Pembangunan MEF Tahap II Yang Berhasil Dipenuhi Melalui Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis

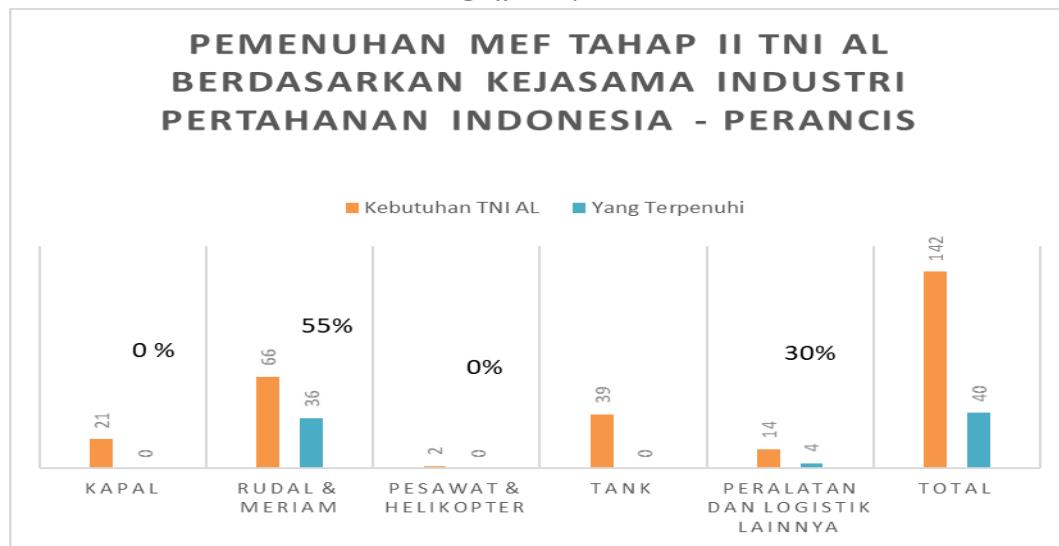
No.	Jenis Alutsista	Jumlah Unit Yang Dibutuhkan	Jumlah Unit Yang Terpenuhi	Keterangan
1.	Kapal	21 Unit	-	-
2.	Rudal & Meriam	66 Unit	36 Unit	Rudal MICA VLS From MBDA Perancis Rudal EXOCET Upgrade dari <i>Block</i> 2 menjadi <i>Block</i> 3
3.	Pesawat & Helikopter	2 Unit	-	-
4.	Tank	39 Unit	-	-
5.	Peralatan dan Logistik Lainnya	14 Paket	4 Paket	4 Paket <i>Full Combat Mission</i> untuk Helikopter Anti Kapal Selam from Airbus AS565 MBe <i>Panther</i>
6.	Total	142 Unit	40 Unit	-

Sumber : Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Tidak banyak Alutsista serta peralatan dan logistik lainnya yang dapat dipenuhi melalui kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis. Total jumlah keseluruhan yang dapat dipenuhi melalui kerja sama industri pertahanan dengan Perancis hanya sekitar 28% dari keseluruhan pengadaan (Grafik 2.).

Alutsista yang dapat dipenuhi antara lain Upgrade FCS SSM Rudal Exocet yang pembeliannya dilakukan sejak 2016 – 2018 sebanyak 30 Unit, kemudian rudal MICA VLS sebanyak 6 Unit dan Full Combat Mission Helikopter AKS AS565 MBe Panther 4 Paket (SIPRI, 2020).

Grafik 2.



TNI AU

Kebutuhan alutsista TNI AU dalam Pembangunan MEF Tahap II diantaranya meliputi pengadaan pesawat pengganti F-5 12 unit, Pesawat NC-212i 9 unit, Pesawat CN-295 *Special Mission* 1 unit, Pesawat Angkut Berat 4 unit, Pesawat G-120 TP (Grob) 6 unit, Pesawat KT-1B 10 unit, Pesawat *Multi-Purpose Amphibious* 4 unit,

Helikopter Angkut Berat 6 unit, Helikopter Angkut VVIP 2 unit, Radar GCI 4 unit, PSU 3 Satbak, PTTA/UAV 4 unit, Bom (P-250 dan P-100) 2.000 unit, Rudal Jarak Sedang 1 Satbak, kelengkapan Radar 16 set dan senjata Pesawat T-50i 12 set, serta modernisasi Pesawat C-130 H/HS 8 unit (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Tabel 3.

Kebutuhan Alutsista TNI AU Pada Pembangunan MEF Tahap II Yang Berhasil Dipenuhi Melalui Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia-Perancis

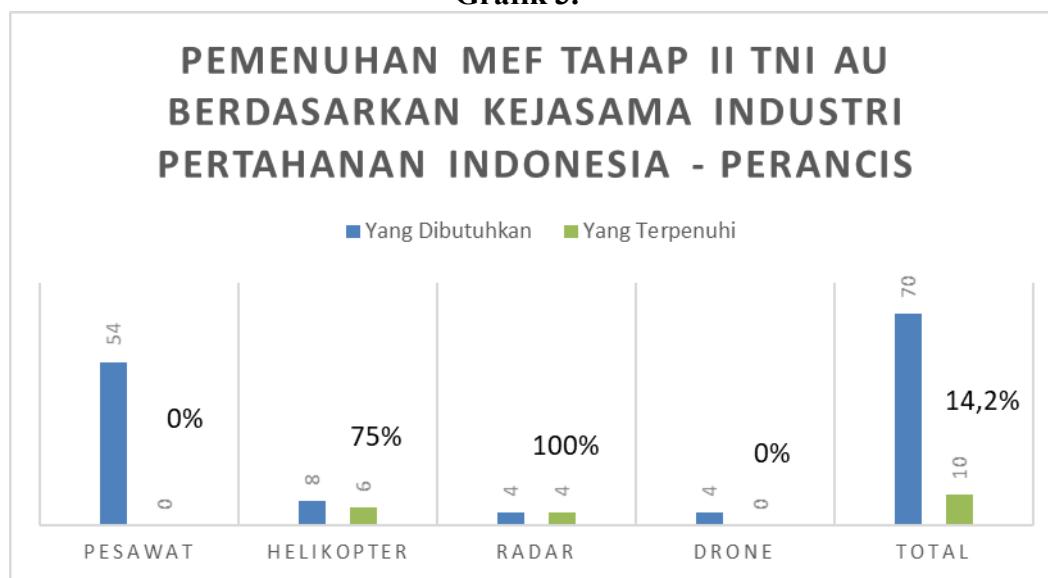
No.	Jenis Alutsista	Jumlah Yang Dibutuhkan	Jumlah Yang Terpenuhi	Keterangan
1.	Pesawat	54 Unit	-	
2.	Helikopter	8 Unit	6 Unit	Helikopter EC725 atau H225M Produksi Airbus & PT. DI
3.	Radar	4 Unit	4 Unit	Radar Master-T Produksi Thales Perancis
4.	Drone	4 Unit	-	-
5.	Total	70 Unit	10 Unit	-

Sumber: Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Dari keseluruhan kebutuhan TNI AU, Kerja sama dengan industri pertahanan

Perancis hanya mampu memenuhi 15% (Grafik 3.).

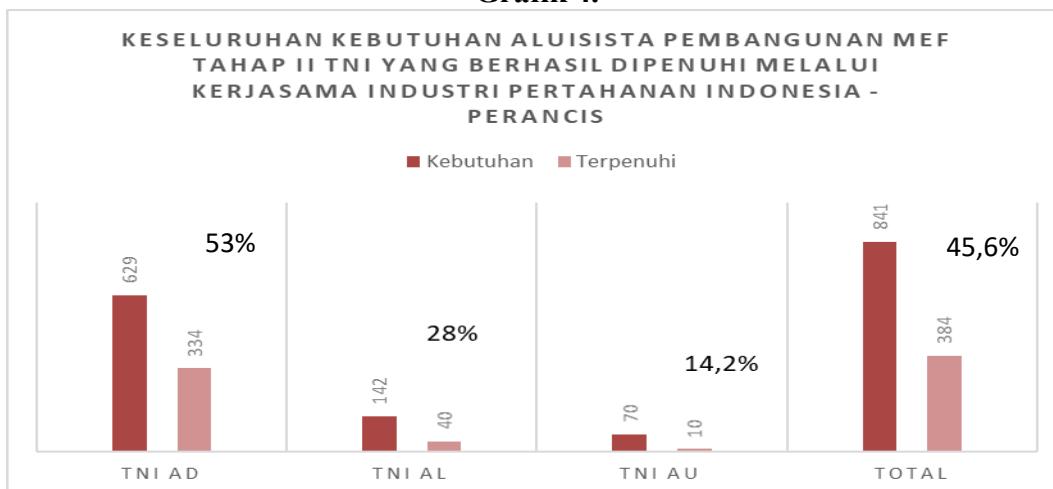
Grafik 3.



Mengacu pada pengukuran tiga matra pertahanan diatas, kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan darat Indonesia berada pada angka yang cukup besar yakni sekitar 53%. Artinya, pada sektor pertahanan darat, pemerintah Indonesia telah mendapat cukup banyak manfaat dari industri pertahanan nasional

yang melakukan kolaborasi dengan industri pertahanan Perancis. Hasil yang berbeda terlihat dalam kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis dalam matra laut yang belum cukup besar kapabilitasnya dalam memenuhi kebutuhan pertahanan laut yang hanya berada pada angka 28% dan pertahanan udara yang berada pada angka 25%.

Grafik 4.



Jika dihitung secara keseluruhan, kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis cukup besar pengaruhnya dalam memenuhi kebutuhan alutsista dalam pembangunan MEF Tahap II TNI yakni berada pada angka 45,6% (Grafik 4.).

Mengacu pada pengukuran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama industri pertahanan Indonesia-Perancis cukup efektif dalam memenuhi MEF tahun 2015-2019. Pasalnya, kerja sama tersebut mampu mencapai sasaran-sasaran yang

ditetapkan. MEF sendiri pada dasarnya merupakan bentuk dari *Revolution in Military Affairs* (RMA) yang sejalan dengan konsep yang dituangkan dalam US *Department of Defence's Office of Force Transformation* dimana dikatakan bahwa RMA didefinisikan sebagai sebuah proses dalam membentuk perubahan sifat perang dalam hal ini kompetisi militer dan kerja sama melalui serangkaian kombinasi dari konsep, kapabilitas, sumber daya manusia dan organisasi yang mengeksplorasi keunggulan bangsa dan melindungi bangsa dari kerentanan asimetris untuk mempertahankan posisi strategis bangsa dan membantu perdamaian dunia (US Department of Defence, 2004). Maka pada dasarnya sasaran yang ditetapkan dalam MEF sifatnya luas tidak hanya sebatas pada pencapaian postur ideal alutsista. Melalui MEF, pemerintah Indonesia mengharapkan terjadinya transformasi militer menjadi negara *autarky*, yakni negara dengan kemandirian pertahanan. Namun dengan keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, saat ini kerja sama internasional merupakan hal yang cukup penting bagi Indonesia. Indonesia kemudian mengarahkan Undang-Undang pertahanannya pada *Niche-Production Model* dimana hal ini dilakukan oleh negara yang berupaya mengurangi ketergantungan luar negeri dengan mengembangkan kapasitas nasional melalui komitmen dalam melakukan investasi yang besar ke sektor industri pertahanan dan mengupayakan terjadinya transfer teknologi dari produsen senjata yang mapan (Widjajanto, 2012).

KESIMPULAN

Kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Perancis dalam memenuhi MEF tahap II 2015-2019 dapat dikatakan cukup efektif. Kerja sama

industri pertahanan Indonesia dengan Perancis pada periode ini tidak saja memberikan manfaat fisik dalam hal ini pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, melainkan juga memberikan manfaat non-fisik seperti terwujudnya sasaran – sasaran pembangunan MEF tahap II. Melalui kerja sama industri pertahanan dengan Perancis, Indonesia mampu memenuhi setidaknya 45% dari kebutuhan alutsista TNI. Selain itu, melalui kerja sama dengan industri pertahanan Perancis, Indonesia mampu mengambil manfaat non-fisik lainnya seperti alih teknologi, dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang dan sasaran dari MEF dimana terwujudnya industri pertahanan yang maju, mandiri dan berdaya saing. Meskipun begitu, masih diperlukan peningkatan kerja sama pada sektor pertahanan laut dan udara, pada dasarnya Perancis telah melakukan penawaran yang dapat mendukung pertahanan laut dan udara Indonesia, namun penawaran ini masih terus dalam pertimbangan pemerintah Indonesia. Tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, melihat penguasaan teknologi Perancis yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, pada sektor pertahanan udara, Indonesia tampaknya belum dapat meninggalkan jejak historisnya pada produk milik Russia dan Amerika Serikat, meskipun kedua negara tersebut tidak terbuka dalam alih teknologi. Sedangkan pada pertahanan laut, pemerintah Indonesia masih mempercayakan pada produk-produk milik Belanda yang sejak lama digunakan. Selain itu, kondisi industri pertahanan Indonesia sendiri belum cukup kuat untuk membangun kebutuhan pertahanan laut dan udara.

REFERENSI

- Calcara, A. (2017). State-Defence Industry Relations in the European Context: French and UK interactions with the European Defence Agency. *European Security, 26(4)*
- Cohen, E. (2009). Change and Transformation in Military Affairs. In B. Loo, *Military Transformation and Strategy: Revolution in Military Affair and Small States* (p. 16). London: Routledge.
- Dzikri, I. (2016). Negara dan Adopsi Inovasi: Studi Kasus Transformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998 - 2014. *Global: Jurnal Politik Internasional, 18(2)*, DOI: 0.7454/global.v18i2.305
- Kurç, C. & S. G. Neuman (2017) Defence Industries in the 21st Century: A Comparative Analysis. *Defence Studies, 17(3)*, DOI: 10.1080/14702436.2017.1350105
- Kementerian Pertahanan RI. (2008, January 20). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI. Retrieved from kemhan.go.id.
- Kementerian Pertahanan RI. (2012). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Strategic Defence Review) 2011. Kementerian Pertahanan RI. Retrieved from Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2012). *Pengaturan Teknis Tentang Kerja sama Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Menteri Pertahanan dan Urusan Veteran Republik Perancis*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Minimum Essential Force TNI 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2017, Maret 30). *Perkuat Pertahanan Nasional, PT DI Serahkan Helikopter Canggih ke TNI*. Retrieved from Kementerian Pertahanan RI: <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/30/perkuat-pertahanan-nasional-pt-di-serahkan-helikopter-canggih-ke-tni.html>
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). Minutes of Meeting of 3rd Indonesia - France Defence Dialogue. Jakarta: Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2016). *Laporan Hasil Pertemuan IFDD ke-4*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2016). *Minutes of Meeting 4th Indonesia - France Defence Dialogue*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2017). *Tindak Lanjut LoI Enhancing Defence Cooperation RI - Perancis*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2019). *Minutes of Meeting of The 7th Indonesia - France Defence Dialogue*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kompas. (2016, November 24). *Airbus Serahkan 3 Helikopter AS565 Pesanan TNI AL*. Retrieved from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com/read/2016/11/24/12310077/airbus-serahkan.3.helikopter.as565.pesanan.tni.al>
- Kompas. (2017, Maret 15). *PTDI Kirim Ekor dan Badan Helikopter H225/H225M ke Perancis*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2017/03/15/11122961/ptdi.kirim.ekor.dan.bada>

- n.helikopter.h225.h225m.ke.peranc
is
- Laksmono, K. (2019, Desember 9). Kepala Subdit Imbal Dagang Kendungan Lokal dan Offset. (M. Davina, Interviewer)
- Matthews, R. (2001). *Managing the Revolution in Military Affairs*. New York: Palgrave.
- Muradi. (2008, September). Praktik-Praktik Defense Offset di Indonesia. *Analisis CSIS*, 37(3).
- Muradi. (2015, Agustus). Model Pendanaan Industri Pertahanan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pertahanan*, 5(2).
- SIPRI. (2020). *Transfers of Major Weapons: Deals with deliveries or orders made for 2015 to 2018*. Stockholm: SIPRI.
- UK Ministry of Defence. (2014, November). *Joint Doctrine Publication 0-01 UK Defence Doctrine*.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389755/20141208-JDP_0_01_Ed_5_UK_Defence Doctrine.pdf
- US Department of Defence. (2004). *Elements of Defence Transformation*. Washington, D.C.: US Department of Defence.
- Widjajanto, A. (2012, April). Kemandirian Industri Pertahanan. *Harian Kompas* (26 April 2012)
- Widjajanto, A. (2012, Mei). Revolusi Teknologi Militer dan Kemandirian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 2(2), 77.